<http://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/fokbis/index>

ISSN: 2623-2480/ P-ISSN: 1693-5209

Perjanjian Perdagangan Asimetri Indonesia-Eropa-Inggris Pasca Brexit

M. Elfan Kaukab¹, Ahmad Sahide²

^{1,2}) Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta

email: elvankaukab@yahoo.com

Article Information

History of Article:

Received January 3rd 2020

Accepted July 16th 2020

Published July 31th 2020

DOI:

10.32639/fokusbisnis.v19i1.415

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan bagaimana asimetri kesepakatan antara Inggris dengan Indonesia pasca Brexit. Tinjauan literatur pada kesepakatan perdagangan internasional dilakukan dengan menelusuri data kesepakatan yang tersimpan dalam basis data Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam periode 2010-2019. Hasil memperoleh hanya ada satu kesepakatan dagang Indonesia-Inggris yaitu terkait proyek Fourth Stage Multi-stakeholder Forestry Program (4th-MFP). Pada periode yang sama, Indonesia juga ikut serta dalam kesepakatan dagang dengan Uni Eropa bernama Voluntary Partnership Agreement – Forest Law Enforcement Governance and Trade (VPA-FLEGT). VPA-FLEGT asimetri dengan menguntungkan Uni Eropa sementara MFP asimetri dengan menguntungkan Indonesia. Setelah menganalisis kedua kesepakatan, ditemukan kecenderungan bahwa Inggris akan terus mendorong asimetri terjadi karena memiliki undang-undang lingkungan hidup yang ketat dan kebutuhan akan kayu yang besar. Asimetri akan mendorong Indonesia tetap dapat memasok Inggris dengan kayu yang berasal dari sumber-sumber legal pasca Brexit.

Kata Kunci: Brexit, Kesepakatan Asimetri, Industri Kayu, Uni Eropa, Kesepakatan Perdagangan

ABSTRACT

This research aims to predict how negotiation asymmetry between the United Kingdom and Indonesia is post-Brexit. The literary review on international trade agreement was carried out by trailing the agreement data stored in the Indonesia Ministry of Foreign Affairs during the 2010-2019 period. The result shows that there is only one trade agreement between Indonesia and the United Kingdom. It is related to the Fourth Stage Multi-Stakeholder Forestry Program (4th MFP). During the same period, Indonesia has also been taking a part in a trade agreement with the European Union namely Voluntary Partnership Agreement – Forest Law Enforcement Governance and Trade (VPA-FLEGT). VPA-FLEGT asymmetrically benefits the European Union while MFB asymmetrically benefits Indonesia. The analysis suggests that the United Kingdom tends to encourage asymmetry as it has such a strict environmental law and a large need of wood. Asymmetry will prompt Indonesia to supply wood derived from legal sources post-Brexit.

Keywords: Brexit, Asymmetry Agreement, Wood Industry, European Union, Trade Agreement

PENDAHULUAN

Perjanjian dagang asimetri adalah perjanjian dagang dimana satu pihak memikul kewajiban yang lebih berat daripada pihak lainnya. Perjanjian dagang asimetri merupakan situasi yang mencerminkan masalah hubungan kekuasaan (Pansera & Sarkar, 2016) dimana satu pihak merasa sangat berkuasa dibandingkan pihak lain sehingga dapat memaksakan lebih banyak kewajiban bagi pihak lain. Belakangan, perjanjian dagang asimetrik meningkat tajam di berbagai perjanjian dagang bilateral dan multilateral (Gómez-Mera & Barrett, 2012). Perjanjian semacam ini umumnya terjadi antara satu negara maju dengan satu negara berkembang yang lebih lemah, yang sangat mengharapkan perjanjian tersebut walaupun hanya sedikit untung yang diperoleh (Dimitriu, 2014).

Uni Eropa termasuk aktor besar dalam perdagangan dan karenanya, sering memperlakukan perjanjian dagang asimetrik pada negara-negara berkembang. Kesepakatan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa (brexit) pada tahun 2020 praktis melemahkan daya tawar Uni Eropa pada negara-negara berkembang. Di sisi lain, Inggris juga merupakan negara maju, dan karenanya, juga menjadi aktor dalam perjanjian dagang asimetrik. Adanya perubahan peta kekuatan ini kemungkinan akan membawa perubahan pada pola perjanjian dagang asimetrik.

Penelitian sebelumnya meninjau berbagai aspek kebijakan perdagangan pasca Brexit (Adler-Nissen, Galpin, & Rosamond, 2017; Dhingra, Ottaviano, & Sampson, 2017; Holmes, Rollo, & Winters, 2016), tetapi belum ada penelitian sebelumnya yang berupaya meninjau asimetri perjanjian dagang Indonesia dengan negara-negara Uni Eropa dan Inggris pasca Brexit. Artikel ini berusaha meninjau perjanjian dagang Indonesia dengan kedua aktor tersebut: Uni Eropa dan Inggris. Tujuan dari artikel ini adalah memperkirakan bagaimana asimetri kesepakatan antara Inggris dengan Indonesia pasca Brexit. Hasil penelitian ini akan membantu dalam memahami bagaimana saling ketergantungan antara Indonesia dengan Inggris dan Uni Eropa dan bagaimana menyikapi isu perdagangan antara ketiga negara pasca Brexit.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur menggunakan data sekunder dari perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan Uni Eropa dan Indonesia dengan Inggris dalam periode 2010-2019 serta data sekunder pendukung dalam konteks perdagangan terkait. Data perjanjian diperoleh dari Basis Data Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Indonesia. Berkas perjanjian dibaca secara menyeluruh untuk kemudian memperoleh abstraksi penting yang menjadi penekanan pada perjanjian dimaksud. Perjanjian kemudian dibandingkan antara perjanjian Indonesia - Uni Eropa dan perjanjian Indonesia – Inggris. Secara khusus, pada kedua kelompok, diidentifikasi kewajiban-kewajiban yang dikenakan pada masing-masing pihak sehingga dapat diindikasikan adanya asimetri. Isu yang muncul kemudian diperiksa latar belakangnya menggunakan data statistik perdagangan maupun literatur penelitian terdahulu yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari dokumen yang diperoleh, ditemukan dua dokumen yang relevan, dan keduanya mengenai perjanjian dagang kayu antara Indonesia, Uni Eropa, dan Inggris. Secara umum, kedua perjanjian dagang sama-sama asimetrik. Perjanjian dagang Indonesia dengan Uni Eropa, VPA-FLEGT (*Voluntary Partnership Agreement – Forest Law Enforcement Governance and Trade*) (Kementerian Luar Negeri RI, 2014), bersifat asimetrik dengan keuntungan di pihak Uni Eropa. Indonesia diwajibkan membangun sistem yang menjamin kalau produk kayu yang dijual ke Uni Eropa telah memenuhi standar Uni Eropa. VPA-FLEGT sendiri disahkan Indonesia lewat Perpres No 21 Tahun 2014 tentang Pengesahan VPA-FLEGT sementara sistem yang

menopangnya sudah sejak lama diberlakukan untuk meningkatkan ekspor kayu Indonesia (Maryudi, 2016). Sebagai pihak pembeli, standar ini telah ada sebelumnya dan Uni Eropa tidak perlu berusaha banyak dibandingkan Indonesia untuk melaksanakan kewajibannya menjamin ketersediaan pasar.

Sementara itu, perjanjian dengan Inggris, 4th MFP (*Phase-4 Multi-stakeholder Forestry Program*) (Kementerian Luar Negeri RI, 2018), terkesan asimetrik dalam artian sebaliknya, yaitu lebih condong ke pihak Indonesia. Inggris memberikan bantuan dana yang besar sementara Indonesia tinggal menyediakan SDM dan membuat laporan pemanfaatan dana. 4th MFP adalah fase keempat dari perjanjian MFP yang telah disepakati kedua negara tahun 2000. Secara umum, MFP pada setiap tahapnya memberikan bantuan finansial bagi Indonesia untuk menangani masalah produksi kayu yang legal demi mengatasi pembalakan liar dan mitigasi perubahan iklim.

Tabel 1. Perbandingan Perjanjian Perdagangan Kayu Indonesia dengan Uni Eropa dan Inggris

VPA-FLEGT Indonesia-Uni Eropa	4 th MFP
<p>Kewajiban Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk unit khusus informasi verifikasi legalitas kayu, 2. Mengelola SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) 3. Verifikasi legalitas kayu yang diekspor ke pasar-pasar non Uni dan pasar domestik maupun legalitas kayu impor 4. Memakai jasa penilai berkala <p>Kewajiban Uni Eropa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong penggunaan sistem verifikasi ke negara ketiga dan pasar internasional 2. Mencegah adanya kayu ilegal dan produk turunannya di Uni 3. Promosi produk kayu yang legal dan menjamin pasarnya 4. Memakai jasa pemantau independen pasar 	<p>Kewajiban Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan staf teknis 2. Menyediakan dan merawat ruang kantor 3. Menyelenggarakan rapat, kolaborasi, dan pengaturan kerja antara lembaga pusat dan daerah 4. Mempromosikan integrasi program ke dalam pekerjaan sehari-hari dan anggarannya. <p>Kewajiban Inggris:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dana GBP 6,000,000 dengan komposisi 28% untuk manajemen dan administrasi dan 72% untuk kegiatan program, bersumber dari program FGMC (<i>Forest Governance, Market, and Climate</i>)

Keterangan: VPA-FLEGT = *Voluntary Partnership Agreement – Forest Law Enforcement Governance and Trade*; 4th MFP = *Phase-4 Multi-stakeholder Forestry Program*.

Secara teknis, asimetri ini dapat disebabkan jenis perjanjian yang berbeda. Perjanjian dengan Uni Eropa adalah sebuah persetujuan terkait penjualan kayu Indonesia ke Eropa, sementara itu perjanjian dengan Inggris berupa surat pengaturan mengalirnya dana bantuan Inggris ke Indonesia.

Menurut prinsip perbedaan dalam teori keadilan distributif Rawls, ketidaksetaraan dalam distribusi barang primer sosial dapat dijustifikasi jika hal ini menguntungkan pihak yang paling kurang beruntung (Garcia, Ciko, Gaurav, & Hough, 2015). Asimetri antara kewajiban Uni Eropa, kewajiban Inggris, dan kewajiban Indonesia dalam perdagangan kayu mencerminkan situasi ketidaksetaraan dan tata kelola kayu sendiri adalah barang primer sosial. Barang primer sosial adalah barang yang dengan sendirinya berharga bagi banyak orang (Trejo-Mathys, 2013). Karenanya, timbul pertanyaan apakah memang asimetri dalam kedua perjanjian menguntungkan pihak yang paling kurang beruntung?

Dalam kedua kasus, pihak yang paling kurang beruntung adalah masyarakat yang menopang hidupnya dari kayu baik karena keberadaannya atau karena ketidakberadaannya. Kedua perjanjian telah mengakomodir hal ini. Dalam VPA-FLEGT dengan Uni Eropa, pada pasal 12 disebutkan secara khusus tentang pengamanan sosial dimana dalam ayat 1 dinyatakan:

“Dalam rangka meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari persetujuan ini, para pihak sepakat untuk mengembangkan suatu pemahaman yang lebih baik tentang dampaknya terhadap industri perikanan maupun mata pencaharian masyarakat adat dan masyarakat setempat yang mungkin terpengaruh sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional masing-masing” (VPA-FLEGT, Pasal 12 ayat 1).

Di sisi lain, perjanjian 4th MFP dari sejak awal, judul perjanjian telah dimaksudkan untuk mengelola hutan berbasis masyarakat dan tujuannya salah satunya untuk mengentaskan kemiskinan. Berulang kali perjanjian tersebut menegaskan sifatnya yang pro-kemiskinan, inklusif, dan berkelanjutan. Tujuan yang dinyatakan dalam perjanjian perikanan ini adalah:

“...untuk meningkatkan konservasi dan meningkatkan akses komunitas terhadap sumber daya hutan di Indonesia, dengan demikian dapat mencapai keadilan, inklusif, pembangunan berkelanjutan yang dapat mengurangi kemiskinan dan berkontribusi pada pencapaian nasional untuk tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)” (4th MFP, bagian Tujuan)

Dengan melihat pada narasi dari kedua perjanjian, dapat dipahami bahwa asimetri yang ada telah memerhitungkan kelompok yang paling kurang beruntung. Tetapi jika menimbang mana yang lebih baik, asimetri dalam perjanjian kayu Inggris ke Indonesia bukan saja asimetri dan menguntungkan Indonesia, tetapi juga adil secara distributif. Hal ini dapat langsung dilihat dari tujuan perjanjian tersebut yang dimaksudkan untuk meningkatkan akses dan mengurangi kemiskinan. Bandingkan dengan perjanjian dengan Uni Eropa dimana frasa yang digunakan adalah “meminimalkan dampak negatif” ketimbang “memaksimalkan dampak positif”. Artinya, disadari oleh Uni Eropa bahwa keberadaan kebijakan tersebut akan menimbulkan dampak negatif bagi kelompok yang paling kurang beruntung, sehingga harus ada pasal khusus untuk meminimalkannya.

Walau begitu, Indonesia sendirilah yang menginisiasi perjanjian perdagangan kayu VPA-FLEGT. Dalam hal ini, Indonesia turut serta dalam standar produk kayu Uni Eropa yang telah dibuat sebelumnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekspor produk kayu ke Uni Eropa. Bagi Indonesia, jika ekspor kayu mereka ke Uni Eropa terbukti ilegal, maka kayu tersebut akan dikembalikan dan merugikan eksportir. Dengan ikut serta dalam VPA-FLEGT, sistem *due diligence* yang dijalankan setiap saat produk kayu Indonesia masuk ke pelabuhan di Uni Eropa, menjadi tidak lagi diperlukan dan risiko tertolak sudah diatasi sejak awal keberangkatan di Indonesia (Indrawati, 2016).

Masalah bagi kelompok paling kurang beruntung dalam sistem VPA-FLEGT ada di masa-masa awal pemberlakuan. Adanya pemberlakuan sistem ini akan membuat para penjual kayu dalam negeri terpaksa berbenah dan melacak asal usul kayunya. Jika mereka tidak dapat membuktikannya, maka kayu yang telah dibeli dari sumber asal akhirnya tidak dapat dijual dan dapat dikembalikan pada masyarakat yang menebangnya. Masyarakat yang menebangnya, mungkin dari hutan taman nasional secara sembunyi-sembunyi, akhirnya kehilangan harapan mendapatkan keuntungan dari kayu tersebut.

Walau bagaimanapun, tetapih salah bagi masyarakat untuk menebang kayu dari sumber yang tidak sah dan tanpa perjanjian internasional, telah ada hukum pidana untuk perbuatan ini. Sungguh demikian, hal ini menjadi masalah bagi kelompok yang paling kurang beruntung jika pemerintah tidak menyediakan mekanisme mata pencaharian alternatif yang lebih menguntungkan atau setidaknya setara, bagi masyarakat sekitar taman nasional atau hutan-hutan ‘terlarang’.

Upaya perbaikan sebenarnya telah diberlakukan cukup lama oleh pemerintah lewat pembangunan hutan rakyat (Martono & Rahayu, 2017), tetapi efektivitasnya tampak masih terbatas untuk kawasan Jawa (Sudrajat, Hardjanto, & Sundawati, 2016). Cukup banyak dokumentasi yang menunjukkan masih lemahnya sistem hutan rakyat misalnya merusak lingkungan (Suryatmojo, 2014), petani tidak mau menjadikannya pekerjaan utama karena lahan yang terlalu kecil dengan penghasilan tidak mencukupi (Erbaugh, Nurrochmat, & Purnomo, 2017), ketidakpahaman petani dengan pasar sehingga belum memberi manfaat optimal bagi kehidupan mereka (Sabastian *et al.*, 2019), sulitnya pembiayaan (Syamsu, Hardjanto, & Hero, 2019), dan banyaknya penyimpangan (Krott *et al.*, 2014). Tampaknya hal inilah yang

tepat menjadi kekhawatiran Inggris sehingga menggulirkan dana bantuan untuk mendukung perdagangan produk kayu yang dipanen secara legal lewat MFP.

Karena MFP sebenarnya telah ada sejak 2000, timbul anggapan bahwa Brexit tidak berperan dalam asimetri perjanjian perdagangan Uni Eropa – Indonesia – Inggris. Lagi pula, 4th MFP berulang kali merujuk pada VPA-FLEGT sebagai salah satu payung hukum perjanjian kerjasama dengan Indonesia.

Relasi antara MFP, VPA-FLEGT, dan Brexit tampak lebih rumit dari aktivitas saling mendukung tersebut. Ada beberapa alasan untuk hal ini. Pertama, Inggris tampak memandang masalah impor kayu sebagai masalah lingkungan, berbeda dengan Uni Eropa yang memandangnya lebih sebagai masalah ekonomi. Undang-Undang Perubahan Iklim 2008 Inggris adalah landasan hukum yang independen dari Kebijakan Perubahan Iklim Uni Eropa. Undang-undang ini lebih jelas dan tajam, berbeda dari kebijakan perubahan iklim Uni Eropa yang lebih renggang dan rentan kehilangan akuntabilitasnya (Heyvaert & Cavoski, 2017).

Kedua, tidak ada negara Uni Eropa lainnya selain Inggris yang berani mendonorkan dananya untuk kelangsungan produksi kayu legal berkelanjutan di Indonesia. Dari data yang disediakan oleh Kementerian Luar Negeri, kerjasama kehutanan Indonesia dengan negara Eropa hanya ada pada dua negara: Inggris dan Finlandia. Walau demikian, Finlandia hanya membuat kerjasama dalam hal berbagi pengetahuan, pembangunan jaringan, pengembangan kemitraan, kewirausahaan dan investasi, dan pengembangan proyek bersama dalam bidang lingkungan hidup (Kementerian Luar Negeri RI, 2017). Perjanjian yang terbangun terlalu abstrak dan luas. Masih perlu waktu yang panjang untuk dapat menjadikannya konkrit di lapangan.

Pada rentang yang lebih jauh, hingga sekarang Jerman lewat Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia-Jerman (*Gesellschaft Fuer Technische Zusammenarbeit – GTZ*), telah secara aktif terus membantu manajemen hutan Indonesia, tetapi dengan motif berbeda: memerangi perkebunan kelapa sawit yang ekspornya ke Eropa dapat mengancam para petani jagung dan tanaman sejenis di Uni Eropa (Sahide, Maryudi, Supratman, & Giessen, 2016). Jadi, sementara Inggris berusaha mendorong ekspor Indonesia ke negaranya, Jerman sebaliknya, mencegah ekspor Indonesia ke negaranya.

Ketiga, skema VPA-FLEGT dianggap bermasalah karena hanya mengamatkan masalah pembalakan liar pada sisi hilir, sementara mengabaikan sisi hulu yang justru berkaitan erat dengan isu seperti hak asasi manusia dan hak asasi pekerja (Buhmann & Nathan, 2012). Sementara itu, skema MFP bekerja sebaliknya, menyasar pada isu hilir, seperti kemiskinan dan masyarakat kecil. Keduanya bersinergi secara konseptual, tetapi masalah di lapangan berbeda. Aktivitas *Livelihood Impact Assesment* (LIA) yang bertujuan mengevaluasi efek MFP pada masyarakat paling tidak beruntung di akhir MFP-2 gagal dilaksanakan karena pemerintah dan pemangku kepentingan sibuk mengejar kesiapan menghadapi VPA-FLEGT (Richards & Hobley, 2016). Walau bagaimanapun, MFP-2 mencerminkan keseriusan Inggris untuk menjamin keterpasokan kayu bagi negaranya, bahkan seandainya VPA-FLEGT akhirnya bubar atau Inggris melepaskan diri dari VPA-FLEGT seiring dengan lepasnya Inggris dari Uni Eropa.

Ketiga alasan di atas telah mencukupi untuk menunjukkan bahwa Inggris pasca Brexit akan tetap mempertahankan kesepakatan asimetrisnya dengan Indonesia. Inggris akan membantu Indonesia membangun sisi hilir dari perdagangan kayu legal agar saluran perdagangannya dengan Indonesia tetap bertahan pasca Brexit. Hal ini tetap berlaku seandainya pun Inggris masih mengadopsi VPA-FLEGT setelah melepaskan diri dari Uni Eropa.

Dari sisi ekonomi, Inggris juga memiliki kebutuhan kayu yang sangat besar jika dibandingkan dengan Uni Eropa. Hasil penelitian Buongiorno, Johnston, & Zhu (2017) menemukan bahwa perdagangan internasional berdampak pada peningkatan konsumsi bubur kayu di Inggris mencapai 614% sementara peningkatan konsumsi kertas sebesar 179%. Hal ini tidak dapat dipasok oleh dalam negeri yang hanya mengalami peningkatan produksi bubur kayu 83% dan kertas 41%. Di saat yang sama, Indonesia mengalami peningkatan produksi bubur kayu sebesar 191%, lebih rendah dari konsumsi yang hanya naik 83%. Sementara itu, produksi kertas naik 110% sementara konsumsi hanya 34%. Peningkatan produksi secara persentase mungkin tidak besar tetapi menilai luas lahan dan volume produksi yang besar, tentu

saja hal ini sangat besar. Peningkatan produksi bubur kayu Indonesia sebesar 191% setara dengan 4,36 juta m³ sementara peningkatan konsumsi bubur kayu Inggris sebesar 614% hanya setara dengan 1,08 juta m³. Hal ini menunjukkan pentingnya Inggris untuk menjaga pasokan kayunya dari luar negeri, termasuk Indonesia. Bandingkan dengan Uni Eropa yang hanya memperoleh efek kecil dari perdagangan kayu internasional pada produksi dan konsumsinya (Grafik 1).

Grafik 1 Pertumbuhan Produksi dan Konsumsi Kayu 2013 sebagai Efek dari Perdagangan Internasional (Buongiorno *et al.*, 2017)

Hasil di atas menunjukkan bahwa Inggris memiliki kepentingan besar untuk mendapatkan kayu Indonesia lewat perdagangan produk bersertifikat. Kebutuhan kayu yang besar diiringi dengan kesadaran lingkungan yang tinggi menuntut Inggris membangun program asimetri di level hulu sementara memanfaatkan rezim VPA-FLEGT pada level hilir. VPA-FLEGT telah mendorong Indonesia untuk membangun sistem verifikasi legalitas kayu (Fishman & Obidzinski, 2015). Fokus pada sektor hulu ini memungkinkan Inggris lepas dari Uni Eropa tanpa wajib mengadopsi VPA-FLEGT, terlebih mulai ada kecenderungan negara-negara anggota Uni Eropa untuk menyerah dalam penerapan VPA-FLEGT (Rutt, Myers, Ramcilovic-Suominen, & Mcdermott, 2018). Faktanya, pemerintah Inggris sendiri telah menyatakan akan meneruskan kebijakan VPA-FLEGT pasca Brexit (Zeitlin & Overdevest, 2019) dan kasus sukses Indonesia telah dipamerkan oleh asosiasi perdagangan kayu Inggris untuk mendukung VPA-FLEGT pasca Brexit (Jeffrey, 2019).

SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan terhadap kesepakatan perdagangan kayu Indonesia dengan Inggris dan perbandingannya dengan kesepakatan sejenis dengan Uni Eropa, dapat disimpulkan bahwa Inggris tetap akan menjaga asimetri terjadi pasca Brexit. Asimetri ini penting guna memudahkan Indonesia menjual produk kayunya ke Inggris sembari tetap menjaga agar produk kayu tersebut bersertifikat. Asimetri tercapai dengan mendukung penyelesaian masalah hilir di Indonesia dengan pasokan dana sementara mekanisme sertifikasi yang dipicu oleh asimetri kerjasama perdagangan kayu dengan Uni Eropa berjalan.

REFERENSI

- Adler-Nissen, R., Galpin, C., & Rosamond, B. (2017). Performing Brexit : How a post-Brexit world is imagined outside the United Kingdom. *The British Journal of Politics and International Relations*, 19(3), 573–591. <https://doi.org/10.1177/1369148117711092>
- Buhmann, K., & Nathan, I. (2012). Plentiful forests, happy people? The EU's FLEGT approach and its impact on human rights and private forestry sustainability schemes. *Nordic Environmental Law Journal*, 2, 53–82.
- Buongiorno, J., Johnston, C., & Zhu, S. (2017). An assessment of gains and losses from international trade in the forest sector. *Forest Policy and Economics*, 80, 209–217. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.04.004>
- Dhingra, S., Ottaviano, G., & Sampson, T. (2017). A hitch-hiker's guide to post-Brexit trade negotiations: options and principles. *Oxford Review of Economic Policy*, 33(S1), 22–30. <https://doi.org/10.1093/oxrep/grx005>
- Dimitriu, C. (2014). Free trade and exploitation. *Daimon. Revista Internacional de Filosofia*, 62, 101–108.
- Erbaugh, J., Nurrochmat, D., & Purnomo, H. (2017). Regulation, formalization, and smallholder timber production in northern Central Java, Indonesia. *Agroforestry Systems*, 91(5), 867–880. <https://doi.org/10.1007/s10457-016-0037-6>
- Fishman, A., & Obidzinski, K. (2015). Verified Legal? Ramifications of the EU Timber Regulation and Indonesia's Voluntary Partnership Agreement for the Legality of Indonesian Timber. *International Forestry Review*, 17(1), 10–19.
- Garcia, F. J., Ciko, L., Gaurav, A., & Hough, K. (2015). Reforming the International Investment Regime: Lessons from International Trade Law. *Journal of International Economic Law*, 18, 861–892. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgv042>
- Gómez-Mera, L., & Barrett, B. (2012). The Political Economy of Preferential Trade Agreements: Latin America and Beyond. *Latin American Politics and Society*, 54(1), 181–196. <https://doi.org/10.1111/j.1548-2456.2012.00147.x>
- Heyvaert, V., & Cavoski, A. (2017). UK Environmental Law Post Brexit. *Environmental Law Network International Review*, 1, 2–10.
- Holmes, P., Rollo, J., & Winters, L. A. (2016). Negotiating the UK's post - Brexit trade arrangements. *National Institute Economic Review*, 238(1), 22–30.
- Indrawati. (2016). Peran Sektor Bisnis Dalam Penandatanganan Voluntary Partnership Agreement On Forest Law Enforcement Governance And Trade (VPA-FLEGT) antara Indonesia dan Uni Eropa. *Global Insight Journal*, 01(1), 38–54.
- Jeffree, M. (2019). *EU wood promotion programmes and their recognition of FLEGT*.
- Kementerian Luar Negeri RI. Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Republik Indonesia dan Uni Eropa tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatalaksanaan, dan Perdagangan Produk Kayu ke Uni Eropa (2014).
- Kementerian Luar Negeri RI. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup Republik Finlandia tentang Kerjasama Bidang Kehutanan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam (2017).
- Kementerian Luar Negeri RI. Surat Pengaturan Antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Departemen Pembangunan Internasional Kerajaan Inggris Raya Mengenai

Kerja Sama untuk Mendukung Perdagangan Produk Kayu yang Dipanen secara Legal dan Pengelolaan Huta (2018).

- Krott, M., Bader, A., Schusser, C., Devkota, R., Maryudi, A., Giessen, L., & Aurenhammer, H. (2014). Forest Policy and Economics Actor-centred power: The driving force in decentralised community based forest governance. *Forest Policy and Economics*, 49, 34–42. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2013.04.012>
- Martono, D. S., & Rahayu, S. (2017). Estimasi Kandungan Karbon Pohon Mahoni (*Swietenia macrophylla*, King) Penyusun Hutan Rakyat Bersertifikat SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) (Studi Kasus di PPHR Lawu Lestari Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan). *Agri-Tek: Jurnal Ilmu Pertanian, Kehutanan Dan Agroteknologi*, 17(2), 36–41.
- Maryudi, A. (2016). Choosing timber legality verification as a policy instrument to combat illegal logging in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 68, 99–104.
- Pansera, M., & Sarkar, S. (2016). Crafting Sustainable Development Solutions : Frugal Innovations of Grassroots Entrepreneurs. *Sustainability*, 8(51), 1–25. <https://doi.org/10.3390/su8010051>
- Richards, M., & Hobley, M. (2016). Empowering civil society in forest policies and governance: livelihood impact assessment of EU FLEGT Voluntary Partnership Agreements. *The International Forestry Review*, 18(3), 345–356.
- Rutt, R. L., Myers, R., Ramcilovic-Suominen, S., & Mcdermott, C. (2018). FLEGT : Another ‘forestry fad’? *Environmental Science and Policy*, 89, 266–272. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2018.08.012>
- Sabastian, G. E., Yumn, A., Roshetko, J. M., Manalu, P., Martini, E., & Perdana, A. (2019). Adoption of silvicultural practices in smallholder timber and NTFPs production systems in Indonesia. *Agroforestry Systems*, 93(2), 607–620. <https://doi.org/10.1007/s10457-017-0155-9>
- Sahide, M., Maryudi, A., Supratman, & Giessen, L. (2016). Forest Policy and Economics Is Indonesia utilising its international partners? The driving forces behind Forest Management Units. *Forest Policy and Economics*, 69, 11–20. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2016.04.002>
- Sudrajat, A., Hardjanto, & Sundawati, L. (2016). Partisipasi Petani dalam Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari : Kasus di Desa Cikeusal dan Desa Kananga Kabupaten Kuningan. *Jurnal Silvikultur Tropika*, 07(1), 8–17.
- Suryatmojo, H. (2014). Recovery of Forest Soil Disturbance in the Intensive Forest Management System. *Procedia Environmental Sciences*, 20, 832–840. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2014.03.101>
- Syamsu, I. F., Hardjanto, & Hero, Y. (2019). Pinjaman Tunda Tebang Hutan Rakyat: Siapa yang Mengakses? (Studi Kasus : Hutan Rakyat di Bojonegoro). *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 9(1), 114–127. <https://doi.org/10.29244/jpsl.9.1.114-127>
- Trejo-Mathys, J. (2013). Towards a Critical Theory of the World Trade Organization : Thinking with Rawls beyond Rawls. *Constellations*, 20(3), 459–483. <https://doi.org/10.1111/1467-8675.12051>
- Zeitlin, J., & Overdevest, C. (2019). *Experimentalist Interactions: FLEGT and the Transnational Timber Legality Regime*. Amsterdam. Retrieved from <https://ssrn.com/abstract=3406065>